



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 868 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diterapkan sistem akuntabilitas kinerja yang jelas dan terukur melalui penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa untuk menjamin penerapan sistem akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :
- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini ;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan review kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2019



INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|---|--------|--|--|
| 1 | Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat | 1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Angka | <p>IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; (3) Standar hidup layak.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ | Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Sosial Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Trans dan Tenaga Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PerinDagKop dan UKM Dinas PMD |
| 2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | 1 | Angka kemiskinan | Persen | <p>Angka Kemiskinan adalah Persentase Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).</p> | Dinas Sosial Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Transi dan Tenaga Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PerinDagKop dan UKM Dinas PMD |
| 3 | Berkurangnya Pengangguran | 1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | <p>Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja</p> $TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Th ke atas}} \times 100$ | Dinas Trans dan Tenaga Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PMD Dinas PerinDagKop dan UKM |
| | | 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | <p>TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran</p> $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ | Dinas Trans dan Tenaga Kerja Dinas PMD Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Pertanian danPangan Dinas Kelautan dan Perikanan |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|-----------------------------------|-------------------------|--|--------|--|---|
| 4 | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 1 | Skor pola pangan harapan | Angka | <p>PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100)</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan = Skor PPH Kelompok Padi-padian + Umbi-umbian + Pangan Hewani + Minyak dan Lemak + Buah ----- Skor PPH Biji Berlemak + Kacang-kacangan + Gula + Sayur dan Buah + Lain=lain (aneka bumbu dan minuman)</p> | Dinas Pertanian dan Pangan Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Trans dan Tenaga Kerja |
| | | 2 | Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita | Rupiah | <p>Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.</p> <p>Pengeluaran konsumsi per kapita = biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan ----- jumlah anggota rumah tangga</p> | Dinas Sosial Dinas Trans dan Tenaga Kerja Dinas PerindagKop dan UMKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PMD |
| 5 | Berkembangnya usaha ekonomi lokal | 1 | Persentase desa maju dan mandiri | Persen | <p>Desa Maju dan Mandiri mengacu pada penetapan Indeks Desa Membangun yang diukur dengan menggunakan parameter PermenPDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun . IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi Indeks Desa Membangun (IDM)</p> | Dinas PMD Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PerinDagKop dan UKM |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|---------------------------------|--------|--|---|
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 1 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | <p>Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.</p> $RLS = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ <p>xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n =Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | <p>Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.</p> $HLSt-a = FK \times \left(\sum_{i=a}^n E_{t-i} \right) / P_{t-i}$ <p>HLSt-a = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi</p> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Meningkatnya Derajat Kesehatan | 1 | Angka Harapan Hidup (AHH) | Angka | <p>AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.</p> <p>Rumusan : AHH = Angka Kematian menurut umur yang datanya diperoeh dari cataran registrasi kematian secara bertahun-tahun</p> | Dinas Kesehatan |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Angka | <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ | Dinas P2KBP3A Badan Kesbang dan Politik Dinas Pemuda, OR dan Pariwisata Dinas PerinDagKop dan UMKM |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---|-------------------------|--|----------|--|---|
| | | 2 | Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) | Predikat | Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA meliputi : 1. penguatan kelembagaan, 2. klaster hak anak, terdiri atas : Predikat KLA diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah dilakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian dengan menggunakan instrumen tersebut di atas. | Dinas P2KBP3A Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas PMD Camat |
| 9 | Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan | 1 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | Persen | Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa sektor industri pengolahan dalam selang waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan = $\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (t)} - \text{Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (t-1)}} \times 100$ | Dinas PerinDagKop dan UKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Penanaman Modal PTSP Dinas Pemuda OR dan Pariwisata Dinas Transdan Tenaga Kerja Dinas PMD |
| | | 2 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | Persen | Laju Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran = $\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sektorperdagangan besar dan eceran (t)} - \text{Pertumbuhan PDRB sektorperdagangan besar dan eceran (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektorperdagangan besar dan eceran (t-1)}} \times 100$ t : Tahun Berkenaan t-1 : 1 tahun sebelumnya | Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas PMD |
| 10 | Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah | 1 | Jumlah wisatawan | orang | Jumlah Wisatawan yaitu jumlah orang yang melakukan perjalanan berkunjung ke tempat wisata dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam 1 (satu) tahun, baik dari luar maupun dalam Polewali Mandar | Dinas Pemuda OR Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PerinDagKop dan UMKM |
| 11 | Meningkatnya Investasi Daerah | 1 | Nilai realisasi investasi daerah PMDN | Rupiah | Nilai realisasi investasi daerah PMDN dihitung dengan cara rekapitulasi jumlah nilai penanaman modal dalam negeri yang terjadi atas persetujuan Dinas PMPTSP dalam satu tahun | Dinas Penanaman Modal PTSP Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|--|----------|---|--|
| | | 2 | Nilai realisasi investasi daerah PMA | Rupiah | Nilai Realisasi investasi daerah PMA dihitung dengan cara rekapitulasi jumlah nilai penanaman modal asing di Kabupaten Polewali Mandar atas persetujuan Dinas PMPTSP dalam sat tahun | Dinas Penanaman Modal PTSP Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 12 | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata dan Berkualitas | 1 | Persentase Pertumbuhan Ekonomi | Persen | <p>Indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Kegunaan indikator ini adalah : a). Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan; b). Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan untuk perencanaan pembangunan daerah;</p> $\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ | Bappeda Litbang Dinas PerinDagKop dan UKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Penanaman Modal PTSP Dinas Pemuda OR dan Pariwisata Dinas Transdan Tenaga Kerja Dinas PMD |
| 13 | Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan | 1 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | Persen | <p>Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan = $\frac{\text{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (t)} - \text{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (t-1)}} \times 100$</p> <p>t : tahun berkenaan t-1 : 1 tahun sebelumnya</p> | Dinas Dinas PerinDagKop dan UMKM Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 14 | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur | 1 | Indeks infrastruktur | Angka | <p>Indeks infrastruktur merupakan indeks kinerja untuk mengukur hasil pembangunan infrastruktur yang terdiri : kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, infrastruktur jaringan irigasi, dan infrastruktur perhubungan.</p> <p>Indeks Infrastruktur = $(30\% \times \text{I. Jalan}) + (20\% \times \text{I. Jembatan}) + (20\% \times \text{I. Irigasi}) + (15\% \times \text{I. Permukiman}) + (15\% \times \text{I. Perhubungan})$</p> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan Dinas Perhubungan |
| 15 | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi | 1 | Angka kecelakaan lalu lintas | Kejadian | Angka kecelakaan lalu lintas, dihitung dengan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas dalam ruas jalan Kabupaten Polewali Mandar, yang berakibat pada meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan | Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 16 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan | 1 | Persentase jalan dalam kondisi mantap | Persen | <p>Jalan kondisi Mantap = $\frac{\text{panjang ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu}}{\text{panjang seluruh ruas jalan dalam kewenangan Pemerintah Daerah (dalam km)}} \times 100$</p> | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|--|--------|---|--|
| 17 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi | 1 | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | Persen | Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik = Panjang jaringan Irigasi dalam kondisi baik ----- x 100 panjang seluruh jaringan irigasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pertanian dan Pangan |
| 18 | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman | 1 | Indeks infrastruktur permukiman | Angka | Infrastruktur Permukiman meliputi : - Permukiman Kumuh - Air Minum - Air Limbah - Persampahan - Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan Indeks Infrastruktur Permukiman adalah : Rekalipulasi Indeks komponen infrastruktur permukiman ----- Jumlah komponen infrastruktur yang diukur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Bappeda Litbang |
| 19 | Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup | 1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Angka | IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKTL) IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|--|-------------------------|--|----------|---|--|
| 20 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | 1 | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Predikat | Hasil Evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB meliputi : Perencanaan Kinerja, Pegukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP | Bappeda Litbang Badan Keuangan BKPP Badan Pendapatan Inspektorat Dinas KominfoSP Bagian Organisasi Seluruh Perangkat Daerah |
| | | 2 | Opini pengelolaan keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI | Sekretariat Daerah Inspektorat Badan Keuangan Badan Pendapatan Bappeda Litbang Seluruh Perangkat Daerah |
| | | 3 | Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Angka | Tingkat maturitas SPIP merupakan gambaran tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP | Sekretariat Daerah Inspektorat BAPPEDA Litbang Badan Keuangan Badan Pendapatan seluruh Perangkat Daerah |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|---------|-------------------------|---|----------|---|---|
| | | 4 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Angka | Indeks SPBE adalah kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SPBE Nasional, Kementerian PAN dan RB | Dinas Komunikasi SP Bappeda Litbang Badan Keuangan BKPP Sekretariat Daerah Inspektorat Dinas PMPTSP Seluruh Perangkat Daerah |
| | | 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat | Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM = Jumlah indeks kepuasan masyarakat dari seluruh survey kepuasan yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan publik yang dilakukan survey | Dinas PMPTSP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan RSUD Polewali Seluruh Perangkat Daerah Kelurahan/ Desa |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM


MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|-----------------------|--|--|----------|---|
| I. SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan komunikasi pimpinan dan keprotokolan | 1 Indeks kepuasan pelayanan kehumasan dan keprotokolan | Predikat | <p>Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholder dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Indeks Kepuasan = Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari survey kepuasan pelayanan kehumasan dan keprotokolan yang dilakukan Satuan Kerja secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan yang dilakukan survey</p> |
| 2 | Meningkatnya kualitas harmonisasi produk hukum | 1 Persentase Produk Hukum yang harmonis | Persen | <p>Harmonisasi Hukum adalah suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.</p> <p>Harmonisasi Produk Hukum = Jumlah Produk Hukum yang telah diharmonisasi ----- x 100 Jumlah Produk Hukum Yang Harus diharmonisasi</p> |
| 3 | Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa | 1 Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu | Persen | <p>Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang telah sesuai dengan standar, RUP dan dilaksanakan tepat waktu ----- X 100 Jumlah seluruh paket pengadaan barang dan jasa</p> |
| 4 | Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1 Persentase Perangkat Daerah dengan predikat Reformasi Birokrasi Baik | Persen | <p>Jumlah Perangkat Daerah dengan predikat Reformasi Birokrasi Baik ----- X 100 Jumlah seluruh Perangkat Daerah</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|---|
| 5 | Meningkatnya kualitas koordinasi, monitoring, evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | 1 | Indeks Kepuasan layanan koordinasi,monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan | Predikat | Indeks Kepuasan = Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari seluruh survey kepuasan layanan koordinasi,monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan layanan koordinasi,monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan survey |
| 6 | Meningkatnya kualitas layanan penataan kebijakan pemerintah daerah | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Penataan kebijakan | Predikat | Indeks Kepuasan = Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari seluruh survey kepuasan Pelayanan Penataan kebijakan yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan Pelayanan Penataan kebijakan yang dilakukan survey |
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----------------------|---|-------------------------|---|----------|--|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <div><div>IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</div><div>-----</div><div>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</div></div> |
| II. SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD | 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD | Predikat | <div><div>IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan kesekretariatan DPRD yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</div><div>-----</div><div>Jumlah jenis pelayanan kesekretariatan DPRD yang dilakukan survey</div></div> |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <div>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</div> <div>Predikat SAKIP meliputi :</div> <div><div>- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan</div><div>- A > 80 - 90 : Memuaskan</div><div>- BB > 70 - 80 : Sangat baik</div><div>- B > 60 - 70 : Baik</div><div>- CC > 50 - 60 : Cukup</div><div>- C > 30 - 50 : Kurang</div><div>- D > 0 - 30 : Sangat Kurang</div></div> <div>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</div> |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP perangkat daerah | Predikat | <div>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</div> <div>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</div> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | | <div><div>IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</div><div>-----</div><div>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</div></div> |
| III. INSPEKTORAT | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---|--|-------------------------|--|----------|--|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | 1 | Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP | Persen | <p>SPIP merupakan Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :</p> <p>1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Kegiatan pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi, 5. Pemantauan pengendalian intern</p> <p>Metode perhitungan :</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP ----- x 100</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah</p> |
| 2 | Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkompeten dalam bidang pengawasan | 1 | Persentase Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang kompeten | Persen | <p>Jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan ----- X 100</p> <p>Jumlah APIP</p> |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <p>- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan</p> <p>- A > 80 - 90 : Memuaskan</p> <p>- BB > 70 - 80 : Sangat baik</p> <p>- B > 60 - 70 : Baik</p> <p>- CC > 50 - 60 : Cukup</p> <p>- C > 30 - 50 : Kurang</p> <p>- D > 0 - 30 : Sangat Kurang</p> <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> <p>Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala -----</p> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p> |
| IV. BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|--|----------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | 1 | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar | Persen | $\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar ketentuan penyusunan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan pembangunan}} \times 100$ |
| | | 2 | Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD | Persen | $\frac{\text{Jumlah program selaras antara RPJMD dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program RKPD}} \times 100$ |
| | | 3 | Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD | Persen | $\frac{\text{Jumlah kegiatan yang konsisten antara RKPD dengan APBD}}{\text{Jumlah Kegiatan dalam APBD}} \times 100$ |
| | | 4 | Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah | Persen | $\frac{\text{Jumlah program perencanaan pembangunan daerah yang mencapai target perencanaan}}{\text{Jumlah Program}} \times 100$ |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penelitian dan pengembangan | 1 | Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan | Persen | $\frac{\text{Jumlah pengkajian dan kelitbangan yang menghasilkan inovasi}}{\text{Jumlah pengkajian dan kelitbangan}} \times 100$ |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pegukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|-------------------|---|-------------------------|--|----------|--|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$ |
| V. BADAN KEUANGAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah | 1 | Persentase tertib penyusunan anggaran | Persen | $\frac{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah}} \times 100$ |
| | | 2 | Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan | Persen | $\frac{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan}} \times 100$ |
| | | 3 | Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan | Persen | $\frac{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan}} \times 100$ |
| 2 | Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah | 1 | Persentase tertib manajemen aset | Persen | $\frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset}} \times 100$ |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----------------------|---|-------------------------|---|----------|---|
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| VI. BADAN PENDAPATAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah | 1 | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | Rupiah | Jumlah penerimaan Pajak Daerah dalam satu periode tahun anggaran |
| | | 2 | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | Rupiah | Jumlah penerimaan Retribusi Daerah dalam satu periode tahun anggaran |
| | | 3 | Persentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu | Persen | Jumlah Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu ----- X 100 Jumlah Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|---|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| VII. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kompetensi Aparatur | 1 | persentase ASN yang telah Memenuhi standar Kompetensi Jabatan | Persen | Jumlah ASN yang telah Memenuhi standar Kompetensi Jabatan pada jabatan yang ditempati ----- X 100 Jumlah ASN |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|---|
| 2 | Miingkatkannya Profesionalitas Aparatur | 1 | Indeks Profesionalitas Aparatur | Predikat | <p>Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, meliputi Dimensi :</p> <p>a) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah</p> <p>b) Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.</p> <p>c) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS</p> <p>d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS</p> <p>Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>a. 91 – 100;</p> <p>b. 81 – 90;</p> <p>c. 71 – 80;</p> <p>d. 61 – 70; dan</p> <p>e. 60 ke bawah.</p> <p>Sebutan tingkat Profesionalitas ASN diatas adalah :</p> <p>a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;</p> <p>b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81–90;</p> <p>c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71–80;</p> <p>d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61–70;</p> <p>e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.</p> |
| 3 | Meningkatnya kualitas administrasi Kepegawaian Daerah | 1 | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah | Predikat | <p>Jumlah Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah yang disurvei (survei kepuasan layanan)</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|-----------------------|---|-------------------------|---|----------|--|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> <p>Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</p> <p>-----</p> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p> |
| VIII. DINAS KESEHATAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Pelayanan Kesehatan | Predikat | <p>Jumlah Indeks Kepuasan Layanan kesehatan</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah Layanan kesehatan yang disurvei (survei kepuasan layanan)</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|--|-------------------------|--|----------|--|
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat yang mandiri dan partisipatif | 1 | Indeks Keluarga Sehat | Predikat | IKS merupakan instrument untuk mengukur Keluarga Sehat. Sebuah Keluarga itu dinyatakan sehat bila indikator yang layak diterapkan pada keluarga tersebut >80%. Terdapat 12 indikator yang digunakan yaitu : 1. Keluarga mengikuti program KB 2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat ASI eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Kesehatan | 1 | Rasio Poskesdes Per Desa | Rasio | yaitu perbandingan yang menunjukkan jumlah Poskesdes per Desa |
| | | 2 | Rasio Tenaga Para Medis per 100.000 penduduk | Rasio | yaitu perbandingan yang menunjukkan jumlah Tenaga Paramedis per 100.000 penduduk |
| 4 | Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular | 1 | Case Fatality Rate Kejadian Luar Biasa | kejadian | yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu, dengan sejumlah kriteria antara lain : a) Timbulnya suatu penyakit / kesakitan yang sebelumnya tidak ada / tidak dikenal. b) Peningkatan kejadian penyakit / kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya c) Peningkatan kejadian /kematian 2 (dua) kali atau lebih dibanding dari suatu penyakit dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun). d) Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya. e) Angka rata-rata per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan 2 (dua) kali lipat atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dari tahun sebelumnya |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|----------|---|
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| IX. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam kondisi baik : - SD - SMP | 1 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik | Persen | Jumlah sarana dan prasarana SD terpenuhi dalam kondisi baik ----- X 100 Jumlah sarana dan prasarana SD yang dibutuhkan |
| | | 2 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik | Persen | Jumlah sarana dan prasarana SMP terpenuhi dalam kondisi baik ----- X 100 Jumlah sarana dan prasarana SMP yang dibutuhkan |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|--------|--|
| | | 3 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD dalam kondisi baik | Persen | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD terpenuhi dalam kondisi baik ----- X 100 Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan SD yang dibutuhkan |
| | | 4 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP dalam kondisi baik | Persen | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP terpenuhi dalam kondisi baik ----- X 100 Jumlah sarana dan prasarana penunjang pendidikan SMP yang dibutuhkan |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat | 1 | Persentase APK PAUD | Persen | Jumlah murid PAUD ----- X 100 Jumlah penduduk usia 4-6 tahun |
| | | 2 | Persentase angka melek huruf | Persen | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas $AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$ dimana: AMH ₁₅ ^t = Angka Melek Huruf usia 15 tahun keatas pada tahun ke-t MH ₁₅ ^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf pada tahun ke-t P ₁₅ ^t = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun ke-t |
| | | 3 | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD | Persen | Jumlah sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik ----- X 100 Jumlah sarana dan prasarana PAUD |
| | | 4 | Persentase Tenaga Pendidik PAUD yang memenuhi standar kompetensi | Persen | Jumlah guru dan tenaga pendidikan memenuhi standar kompetensi PAUD ----- X 100 Jumlah guru dan tenaga pendidikan PAUD |
| | | 1 | Persentase APK SD/MI | Persen | Jumlah murid SD/ MI ----- X 100 Jumlah penduduk usia 7-12 tahun |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|--------|---|
| 3 | Meningkatnya kualitas pengelolaan pendidikan dan pengajaran | 2 | Persenatse APK SMP/MTs | Persen | $\frac{\text{Jumlah murid SMP/ MTS}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$ |
| | | 3 | Persentase APM SD/MI | Persen | $\frac{\text{Jumlah murid SD/ MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$ |
| | | 4 | Persentase APM SMP/MTs | Persen | $\frac{\text{Jumlah murid SMP/ MTS usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100$ |
| | | 5 | Persentase angka putus sekolah SD/MI | Persen | $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang pernah/ sedang bersekolah}} \times 100$ |
| | | 6 | Persentase angka putus sekolah SMP/MTs | Persen | $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang pernah/ sedang bersekolah}} \times 100$ |
| 4 | Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan | 1 | Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi | Persen | $\frac{\text{Persentase guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah guru SD/SMP yang memenuhi standar kompetensi}} \times 100$ |
| | | 2 | Persenatse tenaga kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi | Persen | $\frac{\text{PersentaseTenaga Kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi}} \times 100$ |
| | | 3 | Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah | Persen | $\frac{\text{jumlah tenaga pendidik yang mengikuti Diklat calon Kepala Sekolah}}{\text{jumlah tenaga pendidik calon Kepala Sekolah}} \times 100$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|--|
| | | 4 | Persentase sekolah yang terakreditasi | Persen | $\frac{\text{Jumlah sekolah yang terakreditasi}}{\text{Jumlah sekolah}} \times 100$ |
| 5 | Meningkatnya Kelestarian Cagar, Seni dan Budaya | 1 | Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan | Persen | $\frac{\text{jumlah situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan}}{\text{jumlah situs cagar budaya}} \times 100$ |
| | | 2 | Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan | Persen | $\frac{\text{Jumlah seni budaya daerah yang aktif dikembangkan}}{\text{jumlah seni budaya daerah}} \times 100$ |
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> $\frac{\text{Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$ |

X. DINAS SOSIAL

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|--|--------|---|
| 1 | Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi | 1 | Persentase PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi | Persen | <p>PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Kriteria PMKS al : Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak berhadapan dengan hukum, Anak Jalanan, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut Usia Telantar, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Orang dengan HIV/AIDS</p> <p>Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Komunitas Adat Terpencil.</p> <p>cara menghitung : $\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani dalam Pelayanan dan Rehabilitasi}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100$</p> |
| 2 | Meningkatnya Keberdayaan PSKS, Kelembagaan Sosial dan PMKS Potensial | 1 | Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan | Persen | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin}} \times 100$ |
| | | 2 | Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Usaha Kesejahteraan Sosial | Persen | $\frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang aktif memberikan Layanan Usaha Kesejahteraan Sosial}}{\text{Jumlah Lembaga Sosial}} \times 100$ <p>Lembaga Sosial dimaksud al :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerja Sosial Profesional b) Taruna Siaga Bencana (Tagana) c) Organisasi Sosial d) Karang Taruna e) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga f) Dunia Usaha |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana | 1 | Persentase Masyarakat Miskin penerima Penjaminan Sosial | Persen | $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin penerima Penjaminan Sosial}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin}} \times 100$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---|---|-------------------------|---|----------|---|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XI. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | 1 | Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | Jalan Dalam Kondisi Mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. Metode Perhitungan = Jumlah ruas Jalan Dalam Kondisi baik dan sedang ----- X 100 Jumlah ruas jalan kewenangan Kabupaten |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|--|-------------------------|--|----------|--|
| | | 2 | Persentase Jembatan dalam kondisi baik | Persen | $\frac{\text{Jumlah Jembatan Dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan kewenangan Kabupaten}} \times 100$ |
| 2 | Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi | 1 | Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi baik | Persen | $\frac{\text{Jumlah jaringan Irigasi Dalam Kondisi baik}}{\text{Jumlah jaringan irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100$ |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur Permukiman | 1 | Indeks Infrastruktur Permukiman | Angka | <p>Infrastruktur Permukiman meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Permukiman Kumuh- Air Minum- Air Limbah- Persampahan- Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan <p>Indeks Infrastruktur Permukiman adalah :</p> $\frac{\text{Rekalipulasi Indeks komponen infrastruktur permukiman}}{\text{Jumlah komponen infrastruktur yang diukur}}$ |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Wilayah | 1 | Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang | Persen | $\frac{\text{Jumlah area pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang}}{\text{Jumlah area pemanfaatan Ruang}} \times 100$ |
| 5 | Meningkatnya kualitas Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum | 1 | Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum kondisi baik | Persen | $\frac{\text{Jumlah prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah prasarana pemerintahan dan sarana umum}} \times 100$ |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Konstruksi | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholder dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> $\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari survey kepuasan pelayanan jasa konstruksi yang dilakukan Satuan Kerja secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan jasa konstruksi yang dilakukan survey}}$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|----------|---|
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XII. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 1 | Skor Pola Pangan Harapan | Skor | PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100) Skor Pola Pangan Harapan = Skor PPH Kelompok Padi-padian + Umbi-umbian + Pangan Hewani + Minyak dan Lemak + Buah ----- Skor PPH Biji Berlemak + Kacang-kacangan + Gula + Sayur dan Buah + Lain=lain (aneka bumbu dan minuman) |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|--|
| | | 2 | Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita | Rupiah | Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk konsumsi pangan semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. |
| 2 | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura | 1 | Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura | Ton | Yaitu Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 (satu) tahun, meliputi : Produksi padi, jagung, kedelai, durian, rambutan, langsung, pisang, bawang merah, cabai, wortel, dan kentang |
| 3 | Meningkatnya produksi peternakan | 1 | Jumlah Produksi Peternakan | Kg | Yaitu Jumlah produksi peternakan meliputi : daging sapi, kambing, unggas dan telur unggas |
| 4 | Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan | 1 | Jumlah Produksi tanaman perkebunan | Ton | Yaitu Jumlah produksi perkebunan meliputi : kakao, kelapa, kopi, lada dan kemiri |
| 5 | Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian | 1 | Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian}} \times 100$ |
| 6 | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian | 1 | Persentase pertumbuhan produksi pertanian | Persen | $\frac{\text{Jumlah produksi sektor pertanian tahun (n)} - \text{Jumlah produksi sektor pertanian tahun (n-1)}}{\text{Jumlah produksi sektor pertanian tahun (n-1)}} \times 100$ |
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|--|
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 9 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XIII. DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan | 1 | Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan | | Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholer dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan = Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari survey kepuasan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan ----- Jumlah jenis pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilakukan survey |
| 2 | Meningkatnya Investasi Daerah | 1 | Nilai realisasi investasi daerah PMDN | Rupiah | jumlah realisasi nilai proyek investasi dengan modal dalam negeri dalam 1 (satu) tahun |
| | | 2 | Nilai realisasi investasi daerah PMA | Rupiah | jumlah realisasi nilai proyek investasi dengan modal asing dalam 1 (satu) tahun |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|--|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> <p>Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</p> <p>-----</p> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p> |
| XIV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | |
| | | 1 | Persentase Kepemilikan KTP el | Persen | <p>Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP memiliki KTP-el</p> <p>----- X 100</p> <p>Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|--|
| 1 | Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan | 2 | Persentase Kepemilikan KK | Persen | $\frac{\text{Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$ |
| | | 3 | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun | Persen | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia s.d 18 Tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk Usia s.d. 18 Tahun}} \times 100$ |
| | | 4 | Persentase Kepemilikan Akta Kematian | Persen | $\frac{\text{Jumlah Kematian yang telah dilengkapi dengan Akta Kematian}}{\text{Jumlah Kematian}} \times 100$ |
| | | 5 | Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan | Predikat | <p>Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholer dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> $\frac{\text{Indeks Kepuasan} = \text{Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari survey kepuasan pelayanan administrasi kependudukan}}{\text{Jumlah jenis pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan survey}}$ |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|--|-------------------------|--|----------|---|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XV. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 1 | Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni | Persen | Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni ----- X 100 Jumlah Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR |
| 2 | Meningkatnya kawasan permukiman yang layak | 1 | Luas kawasan kumuh | km2 | Luas Kawasan Kumuh adalah luas kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya |
| 3 | Meningkatnya Kualitas pertanahan pemerintah daerah | 1 | Persentase aset Tanah yang sudah bersertifikat | Persen | Jumlah Aset Tanah Pemerintah Daerah yang telah bersertifikat ----- X 100 Jumlah Aset Tanah Pemerintah Daerah |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|--|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> <p>Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</p> <p>-----</p> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p> |
| XVI. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan | 1 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan | Persen | <p>Indikator yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Kegunaan indikator ini adalah : a). Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan; b). Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan untuk perencanaan pembangunan daerah;</p> <p><i>Laju Pertumbuhan PDRB = $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$</i></p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----------------------------------|---|-------------------------|--|----------|--|
| | | 2 | Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran | Persen | $\frac{\text{Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan} - \text{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (t-1)}}{\text{Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (t-1)}} \times 100$ <p>t : tahun berkenaan t-1 : 1 tahun sebelumnya</p> |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> <p>Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala</p> <p>-----</p> <p>Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey</p> |
| XVII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|--------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah | 1 | Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dalam 1 (satu) tahun yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dalam 1 (satu) tahun}} \times 100$ |
| 2 | Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 1 | Persentase Gangguan keamanan Ketertiban dan ketentraman yang ditindaklanjuti | Persen | $\frac{\text{Jumlah Gangguan keamanan Ketertiban dan ketentraman dalam 1 (satu) tahun yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Gangguan keamanan Ketertiban dan ketentraman dalam 1 (satu) tahun}} \times 100$ |
| 3 | Meningkatnya kualitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi (Dasar) | Persen | $\frac{\text{Jumlah personel Satpol PP yang memiliki kualifikasi (Dasar)}}{\text{Jumlah personel Satpol PP}} \times 100$ |
| | | 2 | Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi (Teknis) | Persen | $\frac{\text{Jumlah personel Satpol PP yang memiliki Teknis}}{\text{Jumlah personel Satpol PP}} \times 100$ |
| 4 | Meningkatnya kesiap-siagaan perlindungan masyarakat | 1 | Persentase Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai | Persen | $\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan tehnis yang memadai}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100$ |
| 5 | Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | 1 | Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran | Persen | $\frac{\text{Jumlah kecamatan yang terjangkau layanan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|---|
| 6 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XVIII. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| 1 | Menngkatnya kualitas tenaga kerja | 1 | Jumlah Tenaga Kerja Terampil | Orang | Jumlah penduduk Usia Kerja yang memiliki ketrampilan dan kemampuan bekerja di bidang pekerjaannya |
| 2 | Meningkatnya Kesempatan Kerja | 1 | Persentase Tenaga Kerja yang terserap | Orang | Jumlah penduduk usia kerja yang terserap lapangan kerja yang tersedia |
| 3 | Berkembangnya kawasan transmigrasi | 1 | Jumlah satuan kawasan pengembangan (SKP) transmigrasi | SKP | Jumlah suatu kawasan yang terdiri atas beberapa Satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------|---|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XIX. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya produksi perikanan budidaya | 1 | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Ton | Jumlah produksi perikanan budidaya meliputi : Perikanan Budidaya Laut, Tambak dan Kolam dalam 1 (satu) tahun |
| 2 | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan pesisir | 1 | Jumlah Produksi perikanan tangkap dan pesisir | Ton | Jumlah produksi perikanan tangkap dan pesisir dalam 1 (satu) tahun |
| 3 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan fasilitas kelompok nelayan dan pembudidaya ikan | 1 | Persentase Kelompok Nelayan dengan kapasitas memadai | Persen | Jumlah kelompok nelayan dengan kapasitas baik dan aktif ----- X 100 Jumlah Kelompok Nelayan |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|--|
| 4 | Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1 | Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Persen | $\frac{\text{Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun (n)} - \text{Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun (n-1)}}{\text{Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tahun (n-1)}} \times 100$ |
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | <p>IKM =</p> $\frac{\text{Jumlah indeks kepuasan stakeholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|---|----------|---|--------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan | 1 | Persentase timbunan sampah yang terkelola | Persen | $\frac{\text{Jumlah timbunan sampah yang terkelola}}{\text{jumlah timbunan sampah}} \times 100$ | | | | | | | | | | |
| | | 2 | persentase pengurangan sampah | Persen | $\frac{\text{jumlah timbunan sampah yang mampu direduksi (dalam 1 tahun)}}{\text{Jumlah timbunan sampah (dalam 1 tahun)}} \times 100$ | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Persentase penanganan persampahan | Persen | $\frac{\text{jumlah produksi sampah dalam 1 tahun yang tertangani}}{\text{jumlah produksi sampah dalam 1 tahun}} \times 100$ | | | | | | | | | | |
| 2 | Terkendalinya kualitas tanah, udara dan air | 1 | Tingkat Pencemaran Lingkungan | Predikat | <div>Hasil Penentuan Pencemaran :</div> <table><tr><th>Indeks</th><th>Penilaian</th></tr><tr><td>$0 \leq PI_j \leq 1$</td><td>Memenuhi Baku Mutu</td></tr><tr><td>$1 < PI_j \leq 5$</td><td>Cemar Ringan</td></tr><tr><td>$5 < PI_j \leq 10$</td><td>Cemar Sedang</td></tr><tr><td>$PI_j > 10$</td><td>Cemar Berat</td></tr></table> | Indeks | Penilaian | $0 \leq PI_j \leq 1$ | Memenuhi Baku Mutu | $1 < PI_j \leq 5$ | Cemar Ringan | $5 < PI_j \leq 10$ | Cemar Sedang | $PI_j > 10$ | Cemar Berat |
| Indeks | Penilaian | | | | | | | | | | | | | | |
| $0 \leq PI_j \leq 1$ | Memenuhi Baku Mutu | | | | | | | | | | | | | | |
| $1 < PI_j \leq 5$ | Cemar Ringan | | | | | | | | | | | | | | |
| $5 < PI_j \leq 10$ | Cemar Sedang | | | | | | | | | | | | | | |
| $PI_j > 10$ | Cemar Berat | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas RTH wilayah Perkotaan | 1 | Persentase Ruang Terbuka Hijau | Persen | $\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau yang tersedia}}{\text{Luas Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau}} \times 100$ | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI | | | | | | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|--|-----------|---|
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXI. DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA | | | | | |
| 1 | Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan | 1 | Jumlah pemuda wirausaha | Orang | Jumlah Pemuda penggerak kewirausahaan |
| | | 2 | Jumlah pemuda pelopor/ penggerak pembangunan | Orang | Jumlah Pemuda yang berkontribusi untuk kemajuan masyarakat di bidang kewirausahaan, pendidikan, teknologi tepat guna, seni budaya dan pariwisata serta kebaharian/kelautan |
| 2 | Meningkatnya Prestasi Olah Raga Daerah | 1 | Jumlah atlet berprestasi | Orang | Jumlah atlet yang berprestasi dalam ajang lomba tingkat Propinsi dan Nasional |
| 3 | Meningkatnya daya saing usaha Pariwisata Daerah | 1 | Jumlah Kunjungan Wisata | Kunjungan | Jumlah kunjungan wisata, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara dalam 1 (satu) tahun |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---|---|-------------------------|---|----------|---|
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXII. DINAS KOMUNIKASI INFORMASI STATISTIK DAN PERSANDIAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik | 1 | Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah | Predikat | Hasil Evaluasi dan penilaian atas implementasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, sesuai instrumen Kuisisioner evaluasi yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut : - nilai 97 – 100 : Informatif - nilai 80 – 96 : Menuju Informatif - nilai 60 – 79 : Cukup Informatif - nilai 40 – 59 : kurang informatif - nilai < 39 : tidak informatif |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---|---|-------------------------|--|----------|---|
| 2 | Meningkatnya kualitas teknologi informasi dan persandian daerah | 1 | Persentase fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi | Persen | Jumlah fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang telah memanfaatkan teknologi sistem informasi ----- X 100 Jumlah fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang membutuhkan dukungan teknologi sistem informasi |
| 3 | Meningkatnya kualitas data statistik daerah. | 1 | Persentase Data Sektoral yang valid | Persen | Jumlah elemen data sektoral yang telah disusun secara lengkap dan update (data terkini) ----- X 100 Jumlah elemen data sektoral |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXIII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| 1 | Meningkatnya kesetaraan gender dan keadilan gender | 1 | IPG | Angka | <p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.</p> $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ |
| 2 | Meningkatnya kualitas Hidup Anak | 1 | Predikat kabupaten layak anak | Predikat | <p>Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penguatan kelembagaan, 2. klaster hak anak, terdiri atas : <p>Predikat KLA diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, setelah dilakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian dengan menggunakan instrumen tersebut di atas.</p> |
| 3 | Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | 1 | Persentase Laju pertumbuhan penduduk | Persen | <p>Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p><i>Metode geometri</i> <i>r : Laju pertumbuhan penduduk</i> <i>P_t : Jumlah penduduk tahun t</i> <i>P₀ : Jumlah penduduk tahun awal</i> <i>t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)</i></p> |
| 4 | Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi | 1 | Persentase peserta KB aktif | Persen | <p>Peserta KB aktif adalah pasangan suami isteri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Metode Perhitungan =</p> $\frac{\text{jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$ |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|--|
| 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 7 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXIV. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | |
| 1 | Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal | 1 | Persentase Desa Maju Mandiri | | Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Klasifikasi Desa Maju dan Mandiri diperoleh melalui metode perhitungan Indeks Desa Membangun, sebagai berikut : Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : <div>IDM = $\frac{1}{3}$ (IKL + IKE + IKS)</div> Keterangan : IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|--|
| 2 | Meningkatnya kualitas pemerintahan desa | 1 | Persentase Desa dengan Status : a) cepat berkembang b) berkembang c) kurang berkembang | | <p>Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan. Indikator yang digunakan al :</p> <p><i>Indikator bidang pemerintahan meliputi :</i> musyawarah desa, BPD, Pemerintah Desa, Administrasi Desa, Keuangan Desa, akuntabilitas, kinerja pelayanan, pemberdayaan masyarakat, teknologi informasi, dan pelestarian adat budaya</p> <p><i>Indikator bidang kewilayahan, meliputi :</i> Identitas desa, inovasi desa, tanggap dan siaga bencana, dan investasi desa</p> <p><i>Indikator bidang kemasyarakatan, meliputi :</i> partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.</p> <p>Hasil evaluasi dengan menggunakan indikator tersebut menghasilkan Desa Status : a) cepat berkembang; b) berkembang; c) kurang berkembang</p> |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|------------------------|---|-------------------------|---|----------|--|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$ |
| XXV. DINAS PERHUBUNGAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kinerja transportasi daerah | 1 | Angka kecelakaan lalu lintas | Angka | <p>Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari serangkaian peristiwa yang tidak disengaja, dengan akibat kematian, luka-luka ataupun kerusakan benda yang terjadi di jalan umum.</p> <p>Metode perhitungan yang digunakan : Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam ruas jalan di wilayah kabupaten Polewali Mandar dalam 1 (satu) tahun</p> |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | <p>Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p>Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|---|----------|--|
| 4 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | $\text{IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$ |
| XXVI. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas Layanan perpustakaan daerah | 1 | Indeks Kepuasan layanan Perpustakaan | Baik | <p>Indeks Kepuasan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/ stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/ stakeholer dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.</p> $\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Jumlah indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder dari survey kepuasan pelayanan perpustakaan daerah}}{\text{Jumlah jenis pelayanan perpustakaan yang dilakukan survey}}$ |
| 2 | Meningkatnya tata kelola arsip sesuai standar | 1 | Predikat Pengelolaan Kearsipan | Predikat | yaitu Hasil evaluasi dan penilaian atas kinerja pengelolaan arsip yang diterbitkan ANRI, dengan indikator evaluasi meliputi : 1) penetapankebijakankearsipan; 2) konsistensi pembinaan kearsipan; 3) keandalan pengelolaan arsip; 4) pengembangan sumber daya manusia kearsipan; 5) kemandirian lembaga; 6)kecukupan pendanaan; 7) kelengkapan prasarana dan sarana kearsipan; dan 8) kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip. |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | <p>Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja</p> <p>Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan- A > 80 - 90 : Memuaskan- BB > 70 - 80 : Sangat baik- B > 60 - 70 : Baik- CC > 50 - 60 : Cukup- C > 30 - 50 : Kurang- D > 0 - 30 : Sangat Kurang <p>Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP</p> |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|--|---|-------------------------|--|----------|--|
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 6 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXVII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Politik Dalam Negeri | 1 | Indeks Pemahaman Politik Masyarakat | Angka | Indeks Pemahaman Politik merupakan assesmen tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik masyarakat. Assesmen dilakukan dengan survei pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik yang dimiliki masyarakat, al : hakkebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlindungan dari perlakuan diskriminatif dll serta kewajiban untuk taat pada hukum yang berlaku, menghormati HAM, menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, kewajiban ikut serta dalam Pemilu dll. |
| 2 | Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Serta Pengawasan Atas Gangguan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 1 | Persentase Potensi Konflik yang Tertangani | Persen | Jumlah Potensi gangguan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang tertangani ----- X 100 Jumlah Potensi gangguan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (dalam 1 tahun) |
| 3 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan | 1 | Indeks Pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat | Angka | Indeks wawasan kebangsanaan merupakan assesmen tingkat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan. Assesmen dilakukan dengan survei pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan meliputi 4 pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|---|---|-------------------------|---|----------|--|
| 5 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
| XXVIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebencanaan | 1 | Indeks Ketahanan Daerah | Angka | IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut.Terdapat 7 komponen penilaian, meliputi : 1) kebijakan dan kelembagaan; 2) pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; 3) pengembangan sistem informasi; 4) Penanganan tematik kawasan bencana; 5) efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7) sistem pemulihan bencana. Dari IKD, maka dapat diketahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Pengukuran IKD, menghasilkan klasifikasi Daerah, sbb : - level 1 : belum ada inisiatif - level 2 : sudah ada inisiatif - level 3 : sudah ada output - level 4 : sudah ada outcome - level 5 : sudah ada impact |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 1 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|---|-------------------------|---|----------|---|
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | 1 | Opini Pengelolaan Keuangan | Predikat | Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala ----- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM



MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013